

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	Solopos
Media Online

Wilayah: Kabupaten Klaten

Halaman 11

Pandemi, Target Pendapatan Asli Daerah Turun

KLATEN—Kemunculan pandemi Covid-19 sejak awal tahun membuat Pemkab menurunkan target pendapatan asli daerah (PAD) sekitar 19 persen.

*Taufiq Sidik Prakoso
redaksi@solopos.co.id*

Penurunan terbesar dilakukan pada target PAD dari sektor pajak daerah. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Klaten, Muh. Himawan Purnomo, menjelaskan target PAD pada APBD 2020 yang sekitar Rp304 miliar, turun menjadi Rp246 miliar pada APBD Perubahan 2020. Ada penurunan sekitar Rp58 miliar. Pada sektor pajak daerah terjadi penurunan target sekitar Rp46 miliar.

Penurunan target PAD menjadi pilihan ketimbang tetap memaksakan target yang sebelumnya ditetapkan. Hal itu menyusul berbagai sektor ekonomi masyarakat terdampak Covid-19. "Kalau target tetap kami paksakan tinggi, masyarakat yang kasihan karena target itu nantinya menjadi piutang. Sementara, membayar pajak itu kewajiban. Kami bahasanya melakukan relaksasi sehingga target kami turunkan," kata Himawan saat ditemui di DPRD Klaten, Rabu (26/8).

Contoh sumber PAD dari sektor pajak disumbang dari pajak restoran. Pandemi Covid-19 membuat restoran sepi pembeli. Sementara, pajak restoran diperoleh dari 10 persen nilai transaksi pembelian.

Dengan kondisi demikian, pengelola restoran diberikan kelonggaran untuk membayar pajak, dari awalnya wajib membayar pajak saban bulan, saat ini bisa dilakukan pada akhir tahun. "Kalau dari restoran tidak ada yang beli, ya mereka tidak bisa membayar pajak," kata Himawan.

Sektor pajak lain yang lesu menyumbang PAD adalah pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak itu diperoleh ketika ada transaksi pengalihan hak tanah. Dengan kondisi ekonomi lesu terdampak Covid-19, transaksi pengalihan hak tanah berkurang.

"Pada pajak parkir juga menurun. Pajak parkir itu dari TWC [taman wisata candi]. Begitu Candi Prambanan tidak bergerak [tutup], sumbangan pajak juga menurun. PPJ [pajak penerangan jalan] juga menurun karena ada kebijakan penggratisan [pajak listrik untuk pelanggan tertentu]. Itu [pandemi Covid-19] juga agak memengaruhi retribusi. Seperti dari pasar juga agak kontraksi," jelas dia.

Kasubbid Penetapan dan Pelayanan Pajak BPKD Klaten, Harjanto Heri Wibowo, mengatakan target terbaru pada APBD Perubahan 2020 bisa tercapai. Dia mencontohkan sektor pajak bumi dan bangunan (PBB). "PBB memang terdampak [pandemi Covid-19], tetapi tidak terlalu. Ada yang bisa kami harapkan. Di beberapa desa, wajib-wajib pajak besar masih bisa membayar pajak sesuai kewajiban. Pada perubahan APBD, target kami kurang Rp4,2 miliar hingga akhir tahun anggaran," jelas dia.

Terkait dampak menurunnya target PAD, Harjanto mengakui secara otomatis memengaruhi kontribusi PAD pada pembangunan daerah tahun depan. "Secara umum berdampak. Tetapi, saya kira tidak terlalu banyak karena memang kontribusi PAD dalam APBD masih rendah," kata dia.

► Pemkab memberikan banyak keringanan kepada wajib pajak dan retribusi.
► Sumbangan PAD kepada total APBD relatif kecil.

Candi Plaosan di Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, tutup selama beberapa bulan terakhir lantaran ada pandemi Covid-19. Candi Plaosan menjadi salah satu objek wisata situs cagar budaya yang dikelola Pemkab Klaten. Foto diambil Jumat (21/8).

PENDAPATAN DAERAH DI APBD PERUBAHAN 2020

Sebelum perubahan
Rp2.721.807.488.100

Setelah perubahan
Rp2.491.720.528.008
(menurun Rp230.086.958.092)

PERINCIANNYA

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

SUMBER	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	PENURUNAN
Pajak daerah	Rp132.050.000.000	Rp85.584.000.000	Rp46.466.000.000
Retribusi daerah	Rp14.123.630.600	Rp10.707.170.000	Rp3.416.433.600
Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	Rp18.285.884.000	Rp14.145.547.096	Rp4.140.336.904
Lain-lain PAD yang sah	Rp140.087.368.500	Rp136.122.080.203	Rp3.965.288.297
PAD	Rp304.546.856.100	Rp246.558.797.299	Rp57.988.058.801

B. Dana Perimbangan

Sebelum perubahan
Rp1.707.736.367.000,

setelah perubahan APBD 2020
Rp1.524.461.996.509
(menurun Rp183.274.370.491)

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sebelum perubahan
Rp709.524.260.000,

setelah perubahan menjadi
Rp720.699.734.200
(kenaikan Rp11.175.471.200)

Sumber: paripurna DPRD Klaten (tau)
Grafis: Wisnu Paksa